

Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa

Muhammad Zulkarnain¹, Yulina Astuti², Erni Wiriani³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase Langsa

³Akademi Keuangan Perbankan Nusantara Aceh Timur

¹e-mail: m.zulkarnain28@gmail.com

²e-mail: yulina.astuti.ya@gmail.com

³e-mail: erniwiriani71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kota Langsa. Data yang digunakan data sekunder dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, Badan Pusat Statistik dan aceh.tibunnews.com tahun 2009-2018. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh langsung rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas bernilai positif terhadap belanja modal dan demikian pada variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji F pada sub struktur I secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pada sub struktur II secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

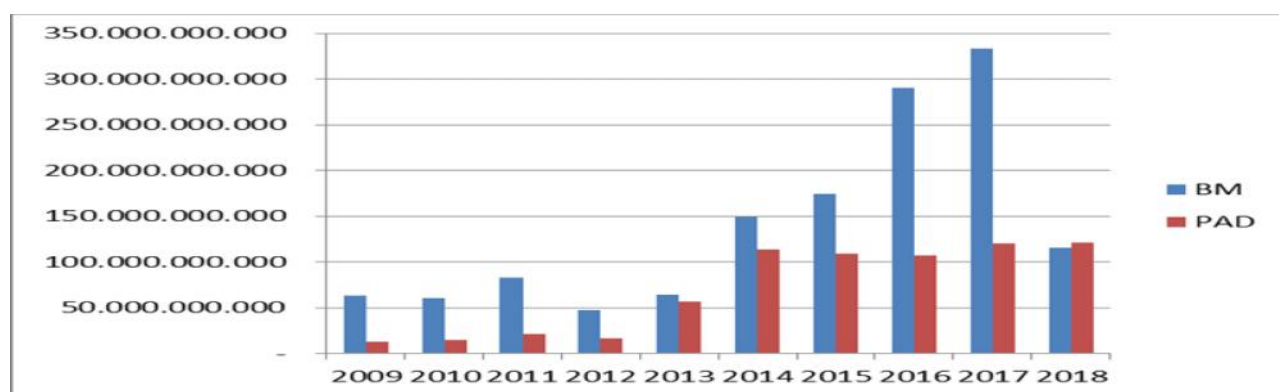
Provinsi Aceh yang memiliki 23 pemerintahan kabupaten dan kota yang terdiri dari 18 Pemerintahan Kabupaten dan 5 Pemerintahan Kota. Salah satu daerahnya adalah Kota Langsa yang memiliki 5 kecamatan. Kota Langsa sebagai daerah yang mendapatkan hak yang sama yaitu otonomi harus mengelola keuangan daerah sesuai daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah ini berdasarkan penerapan otonomi daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembaharuannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. Kebijakan otonomi memberikan peluang bagi daerah untuk mengaktualisasi kewenangan dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah untuk kesejahteraan penduduknya, namun demikian adanya pemaknaan dan penerapan konsep otonomi daerah sebagai sebuah kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensi daerahnya, telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah, kecenderungannya adalah bagi daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang biasanya akan melaju lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang miskin potensi, walaupun itu belum menjadi sebuah jaminan (Zulkarnain, 2017).

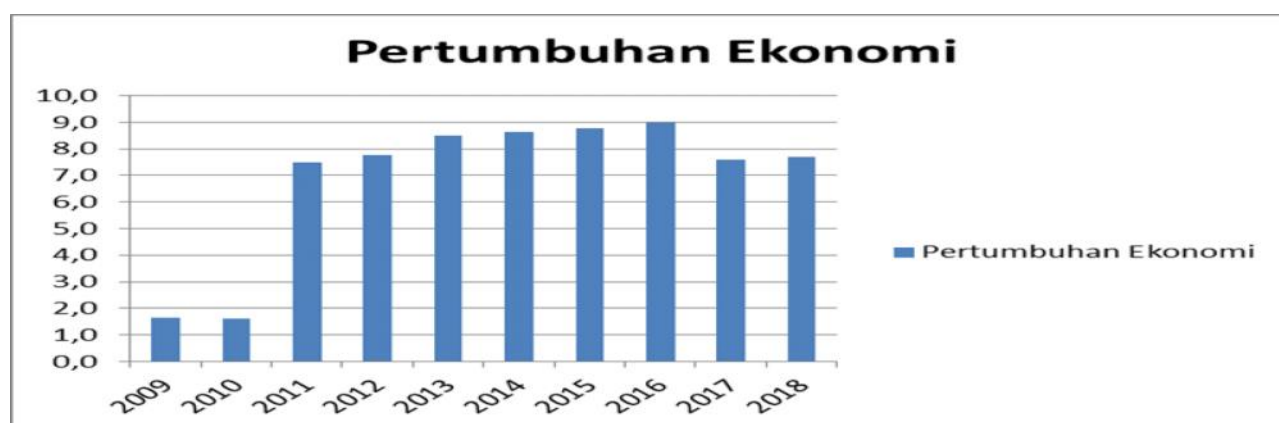
Kota Langsa sebagai daerah yang melakukan pembangunan secara terus menerus semenjak berdiri tahun 2001 untuk

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kota Langsa harus dapat mengelola keuangan sehingga dapat membangun dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Kemudian dengan diterapkannya PP No. 41 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Mengetahui efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dan Kota untuk mengelola keuangan daerahnya adalah

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2012). Penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas. Rasio keuangan ini salah satunya adalah melihat kemandirian daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efektivitas untuk melihat efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik Kota Langsa serta dari aceh.tibunnews.com, diketahui bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kota Langsa sebagai berikut:



Gambar 1. Nilai Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa



Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa

Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sangat jauh perbedaannya. Pendapatan Asli Daerah nilainya lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal, sehingga dapat diketahui bahwa belanja modal tidak sepenuhnya dibiayai oleh Pendapatan Asli

Daerah. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kota Langsa tahun 2009 sampai 2016 mengalami peningkatan akan tetapi tahun 2017 menurun walau ditahun 2018 sedikit meningkat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio

efektivitas terhadap belanja modal dan bagaimana pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Rasio Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2012). Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo, 2002) yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2012) yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Utama, 2008). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan

anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Utama, 2008).

Belanja Modal

Arsa (2012) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulan untuk umum dan lain-lain. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Pertumbuhan Ekonomi

Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan (GDP) atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Adapun Teori tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Teori Klasik
 - a. Adam Smith.

Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

b. David Ricardo.

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*statonary state*). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*.

2. Teori Neoklasik

a. Model *Input-Output Leontief*.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output

antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah.

b. Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus Negara sedang berkembang yang mempunyai banyak penduduk. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

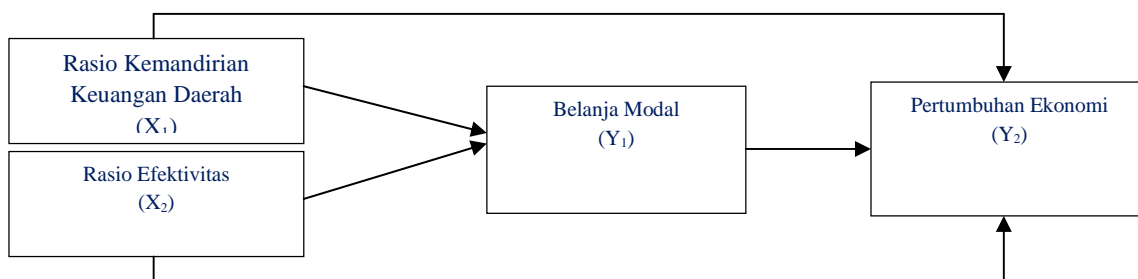
c. Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

d. Harrod Domar

Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

Adapun konsep penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Hubungan Rasio Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa salah satu faktor yang

dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa kenaikan PAD merupakan

ekses dari pertumbuhan ekonomi dan hal ini sesuai dengan Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Machmud, Kawung dan Rompas (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Propinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahunnya masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data keuangand daerah Kota Langsa serta data dari BPS serta dari aceh.tibunnews.com. pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas dan uji

autokorelasi, analisis jalur (*path analisis*) (Sarwono, 2011), uji koefisien determinasi (R^2) dan uji F serta uji t dengan perhitungan menggunakan eviews versi 7.0 (Winarno, 2015).

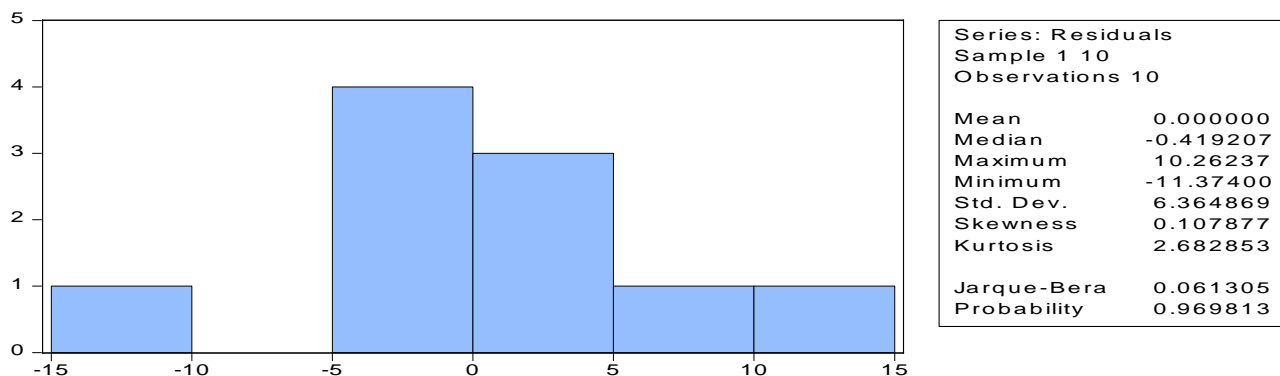
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji Asumsi Klasik

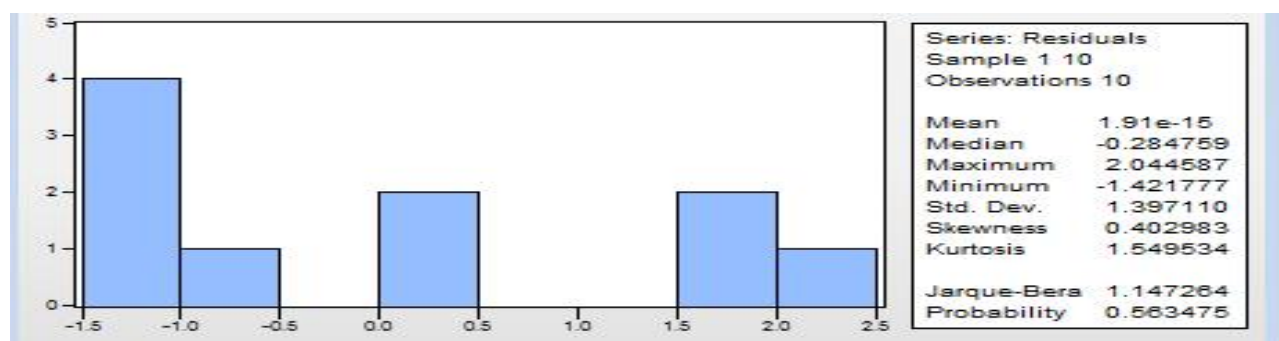
Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) dan tingkat signifikansi yang digunakan 5%. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.
- Jika probabilitas < 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Gambar 4. Uji Normalitas Sub Struktur 1



Gambar 5. Uji Normalitas Sub Struktur 2

Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5, diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B untuk persamaan substruktur I dan substruktur II adalah 0,0969813 dan 0,563475 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik selain uji normalitas dilakukan juga dengan uji multikolinearitas. Hasil hitung dengan menggunakan *views* pada sub struktur I rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas sebesar 4,156518 dan sub II diperoleh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan belanja modal sebesar 4,658277. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memenuhi asumsi multikolinearitas (tidak

mengandung masalah multikolinearitas), karena gejala multikolinearitas terjadi apabila nilai korelasi antar variabel lebih dari 0,8.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan nilai prob Chi-Square yang merupakan nilai p value uji Breusch Godfrey Serial Correlation LM dan dibandingkan dengan nilai 5%, apabila prob Chi-Square > 0,05 maka tidak ada masalah autokorelasi dan sebaliknya apabila prob Chi-Square < 0,05 maka ada masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil hitung untuk sub struktur I maka dapat diketahui nilai prob Chi-Square > 0,05 (0,3436 > 0,05) dan pada sub struktur II prob Chi-Square > 0,05 (0,0930 > 0,05) yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.

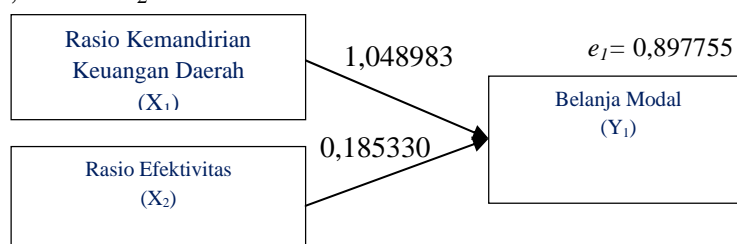
Tabel 1. Hasil Analisis Jalur Pengaruh Langsung

No	Variabel	Coefficient	Prob.
1	R. kemandirian keuangan daerah	1,048983	0,3885
2	R.Efektivitas	0,185330	0,2515
	C	17,28984	0,0266
	R Square	0,193792	
	Pron (F-Statistik)	0,047050	

Sumber: output *Views*, 7.0 (2019)

Berdasarkan hasil regresi sub struktur I diperoleh:

$$Y_1 = 1,048983X_1 + 0,185330X_2$$



Gambar 6. Koefisien jalur untuk persamaan Sub struktur I

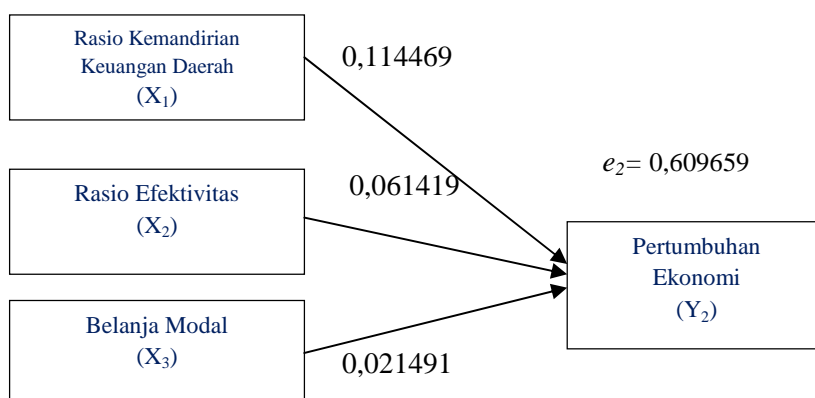
Tabel 2. Hasil Analisis Jalur

No	Variabel	Coefficient	Prob.
1	R. kemandirian keuangan daerah	0,114469	0,7031
2	R.Efektivitas	0,061419	0,1652
3	Belanja modal	0,021491	0,8184
	C	1,780436	0,4357
	Adjusted R Square	0,628316	
	Pron (F-Statistik)	0,030017	

Sumber: output *Views*, 7.0 (2019)

Berdasarkan hasil regresi sub struktur II diperoleh:

$$Y_1 = 0,114469X_1 + 0,061419X_2 + 0,021491X_3$$



Gambar 7. Koefisien jalur untuk persamaan Sub struktur II

1. Pengaruh langsung dari variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) sebesar 0,114469 (bernilai positif). Pengaruh positif berarti ketika nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) meningkat maka terdapat kecenderungan pertumbuhan ekonomi (Y_1) juga meningkat.
2. Pengaruh langsung dari variabel rasio efektifitas (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) sebesar 0,061419 (bernilai positif). Pengaruh positif berarti ketika nilai dari rasio efektifitas (X_2) meningkat maka terdapat kecenderungan pertumbuhan ekonomi (Y_2) juga meningkat.
3. Pengaruh langsung dari variabel belanja modal (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) sebesar 0,021491 (bernilai positif). Pengaruh positif berarti ketika nilai dari belanja modal (X_3) meningkat maka terdapat kecenderungan pertumbuhan ekonomi (Y_2) juga meningkat.
2. Pengaruh rasio efektifitas (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui belanja modal (Y_1) hasil kali antara koefisien jalur dari X_2 ke Y_1 dan Y_1 ke Y_2 , yakni $0,185330 \times 0,021491 = 0,0040$.

Pengaruh Total

Berdasarkan persamaan sub struktur I dan sub struktur II diketahui:

1. Pengaruh total rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui belanja modal (Y_1) yakni $1,048983 + 0,021491 = 1,0706$.
2. Pengaruh total rasio efektifitas (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui belanja modal (Y_1) yakni $0,185330 + 0,021491 = 0,2068$.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui:

1. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) *R Square* pada sub struktur I sebesar 0.193792. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas yakni rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas mempengaruhi belanja modal sebesar 19,3% dengan nilai error sebesar 0,897755. Kecilnya pengaruh variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas terhadap belanja modal dikarenakan kecilnya nilai kemandirian dan efektifitas yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang masih jauh dibawah nilai belanja modal, sementara Pendapatan Asli Daerah apabila jumlahnya besar diharapkan dapat

Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan persamaan sub struktur I dan sub struktur II diketahui:

1. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui belanja modal (Y_1) hasil kali antara koefisien jalur dari X_1 ke Y_1 dan Y_1 ke Y_2 , yakni $1,048983 \times 0,021491 = 0,0225$.

membelanjai daerah sehingga dapat dikatakan mandiri dan efektif.

2. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) *Adjusted R Square* pada sub struktur II sebesar 0.628316. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas yakni rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas serta belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 62,8% dengan nilai error sebesar 0,609659. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi didukung oleh adanya kemandirian daerah dan efektivitas daerah serta belanja modal.

Uji F

1. Hasil uji signifikan menyeluruh (uji F) pada sub struktur I diperoleh nilai prob < 5% ($0,047050 < 0,05$) dapat dinyatakan secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Hasil uji signifikan menyeluruh (uji F) pada sub struktur II diperoleh nilai prob < 5% ($0,030017 < 0,05$) dapat dinyatakan secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas serta belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji t

Hasil uji t pada sub struktur I

1. Rasio kemandirian keuangan daerah nilai prob > 5% ($0,3885 > 0,05$) dapat dinyatakan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.
2. Rasio efektivitas nilai prob > 5% ($0,2515 > 0,05$) dapat dinyatakan rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.

Hasil uji t pada sub struktur II

1. Rasio kemandirian keuangan daerah nilai prob > 5% ($0,7031 > 0,05$) dapat dinyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Rasio efektivitas nilai prob > 5% ($0,1652 > 0,05$) dapat dinyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Belanja modal nilai prob > 5% ($0,8184 > 0,05$) dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa uji signifikansi secara parsial secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan, hal ini dikarenakan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah baik anggaran maupun realisasinya maka akan memberikan dampak terhadap kemandirian dan efektivitas.

5. PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pengaruh langsung rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas bernilai positif terhadap belanja modal dan demikian pada variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji F pada sub struktur I secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pada sub struktur II secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa.

6. REFERENSI

- Arsa, I Ketut. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan Ekoomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi bali tahun 2006 s.d 2013. *Tesis Program Pasca Sarjana Udayana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Halim, Abdul. 2001. **Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.

- _____. 2012. **Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Machmud, Masita. George Kawung dan Wensy Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. **Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi**. Vol 14. No. 2.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 1999. **Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. **Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. **Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. 2006. Depdagri RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang organisasi Perangkat Daerah**. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. **Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2011. **Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS**. Yogyakarta: Andi.
- Sularso, Havid, dan Yanur E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Media Riset Akuntansi**, Vol. 1, No.2. Hal.109-124.
- tribunnews.com. **Walikota: Ekonomi Kota Langsa**. Di ambil dari: www.aceh.tribunnews.com. (27 April 2019).
- Utama, Suyana 2008. **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006**.
- Winarni, Wing Wahyu. 2015. **Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zulkarnain, M., Sadalia Isfenti dan Fachruddin Khaira Amalia. 2017. **Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh**. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.